**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBANTUAN/
MEDEPLICHTIGE DALAM KASUS KERUSUHAN
DEMONSTRASI**

**Oleh: Vannesah Nara Tasya Halim
Pembimbing I: Ferawati, S.H., M.H.
Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Sejahtera, No. 13, Pekanbaru.
Email: vannesanaratasya15@gmail.com**

Abstract

The decision of the Panel of Judges at the Central Jakarta District Court in the criminal case Number: 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, is one of the cases of national concern. The decision relates to the Crime of Assistance/Medeplichtige which raises questions regarding what is the judge's benchmark in deciding the case so that the defendants are interpreted as actors participating in assisting anarchist crimes and what actions can be categorized as assistance in a crime, because in that case it was found that the co-perpetrator of giving drinking water and water for washing his face to the participants in the riot action during the demonstration was sentenced to a criminal sentence even though he had no malicious intent to commit a crime. The purpose of this research is to find out the liability for the criminal assistance/medeplichtige and to find out the suitability between the arrangements regarding the crime of assisting/ medeplichtige and decision No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst related to the demonstration riot case.

The results of this study there are two main points. First, that accountability related to criminal acts of assistance/medeplichtige in Indonesia is regulated in Article 57 of the Criminal Code where in the decision related to the demonstration riot case there are reasons that can negate accountability in a person. Second, after outlining and analyzing the related decisions, it was found that there was a judge's mistake in interpreting the suitability between the actions committed by the Defendants and the arrangement for co-operation crimes because there was no causality between the act and the circumstances after the act was committed and the judge's judgments or judgments in this case were not objective, because it is not based on the facts revealed in court.

Keywords: Medeplichtige-Demonstration-Criminal Liability

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo.¹ Namun terkadang dalam kenyataannya demonstrasi menimbulkan berbagai permasalahan saat pelaksanaannya meskipun tata cara demonstrasi sudah diatur dalam konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.²

Aksi demonstrasi yang seharusnya bertujuan untuk menyampaikan pendapat serta aspirasi kerap berubah menjadi aksi kerusuhan yang melanggar tata tertib dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerusuhan sendiri merupakan peristiwa dimana massa (sekelompok besar orang) melakukan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan buruk lainnya. Kerusuhan dapat hanya melibatkan satu kelompok massa saja yang menjadi orang atau barang sebagai sasaran mereka, dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang.³

Kerusuhan yang dilakukan oleh peserta demonstrasi tersebut merupakan pelanggaran dari hukum positif yang maka dari itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pula. Namun seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana hanya bila terdapat kesalahan pada dirinya. Tidak

mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.⁴

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen strafzonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens rea* yang mana menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.⁵ Dalam hal ini untuk dapat dipidanya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*)⁶.

Melihat hal tersebut, timbul berbagai macam pertanyaan sebab aksi kerusuhan demonstrasi ini sulit dibuktikan kejahatannya sebab dilakukan secara komunal atau berkelompok dan akan sangat sulit menentukan *actus reus* dan *mens rea* dari tiap-tiap orang. Pertanggungjawaban pidana antara pelaku anarkis satu dengan yang lainnya tidak akan sama, hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan orang-orang tersebut berbeda. Ada orang yang tidak terlibat secara langsung aksi kerusuhan tersebut, melainkan seperti: memberi air minum, memberikan air cuci muka, memberikan senjata, memberikan dorongan serta support, memberikan bantuan alat untuk demonstran yang ricuh dan sebagainya.

Lebih dalam, sebenarnya didalam hukum pidana diatur mengenai pembantuan (*medeplichtige*) yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan

¹ Hogi Wahyu Setiawan, dkk., "Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa", *Jurnal Harmeneutika*, Vol 5 No. 1 Februari 2021, hlm. 166.

² Andrizal, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, hlm. 121.

³ Bayu Eka Saputra, "Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan Dan Penyertaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. II. No. 4 Agustus 2013, hlm. 122.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 130.

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP).

Dalam konteks delik perbantuan (Pasal 56 KUHP), dibutuhkan satu syarat penting bahwa: antara perbuatan, niat jahat, dan tujuan, harus berada dalam satu kerangka pikiran, baik pada pelaku utama dan pada pelaku pembantu. Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Pasal 57 KUHP merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantuan. Pasal 60 KUHP mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan.⁷

Salah satu contoh nyata dari aksi kerusuhan yang melibatkan banyak pelaku pembantuan yaitu dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Nomor: 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, dimana 29 orang karyawan Sarinah dengan nama terdakwa salah satunya Terdakwa I Ahmad Zulfikar, Terdakwa II Alvin Nazarkhan, Terdakwa III Endan Herdian, Terdakwa IV Andhi Febriantoro, Terdakwa V Ridwan diduga telah membantu melakukan kejahatan dan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya.⁸

Kejadian ini bermula pada tanggal 21-22 Mei pada tahun 2019 dalam aksi massa penolakan terhadap terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.⁹ Aparat kepolisian sudah menghimbau agar demonstran meninggalkan daerah gedung Bawaslu, namun para demonstran melempari aparat kepolisian dengan batu, kayu, serta petasan, hingga menyebabkan aparat kepolisian memutuskan untuk menembakkan gas air mata kepada para pendemo. Melihat hal tersebut, para

Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Sarinah tersebut memberikan air untuk cuci muka, memberikan air untuk diminum dan membuka pintu gerbang salah satu pos agar para pendemo bisa segera meninggalkan daerah perkarangan sarinah tersebut.

Berdasarkan kronologi diatas, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif dan diancam Pasal 212 KUHP jo Pasal 214 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Pembantuan/ *Medeplichtige* menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah dalam putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst terkait dengan kasus kerusuhan demonstrasi sudah sesuai dengan pengaturan tindak pidana Pembantuan/ *Medeplichtige*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pembantuan/ *medeplichtige* menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan mengenai tindak pidana pembantuan/ *medeplichtige* dengan putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst terkait dengan kasus kerusuhan demonstrasi.

2. Kegunaan Penelitian

persidangan-kasus-kriminalisasi-terhadap-29-karyawan-sarinah, diakses Kamis 13 Oktober 2022
⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919210751-12-432137/kasus-22-mei-29-pegawai-sarinah-divonis-4-bulan-penjara>, diakses Kamis 13 Oktober 2022.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 141.

⁸<https://bantuanhukum.or.id/memenjarakan-kemuliaan-menguburkan-kemanusiaan-refleksi->

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Pidana.
- b. Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
- c. Menjadi bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak khususnya bagi Pemerintah terkait dengan pertanggungjawaban pidana pembantuan / *medeplichtige* dalam kasus kerusuhan demonstrasi

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana

adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Berdasarkan doktrin tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana dan ada sikap bathin jahat/tersela.¹²

2. Teori Kausalitas (Sebab-Akibat)

Kausalitas dalam bahasa Inggris adalah *causality* yang secara etimologis berasal dari bahasa latin "*cause*" yang berarti sebab¹³ atau: prinsip, awal mula, pangkal, pokok, serta sebab yang menjadikan.

Tiap- tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Disamping hal tersebut diatas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Peristiwa sebab dan akibat tersebut di sebut dengan kausalitas.¹⁴

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa

¹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

¹¹ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.68

¹² Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No 11 Tahun 1999, hlm. 27.

¹³ Riska Saputri, Prinsip Kausalitas Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku

Falsafatuna", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022, Hlm. 9.

¹⁴ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantarhukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjanah Mudahukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hlm.381.

yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵

Ajaran kausalitas juga berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab atas suatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.¹⁶ Penentuan suatu sebab akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan delik.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁸
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁹
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi

berupa sanksi pidana²⁰ dan dianggap melawan hukum.²¹

4. Pembantuan / *Medeplichtige* adalah perbuatan yang bersifat memudahkan atau membantu pelaku dengan memberi sokongan agar berhasil dengan baik²² untuk melakukan kejahatannya yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imaterial²³
5. Kerusuhan atau huru-hara adalah kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.²⁴
6. Demonstrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan pendapat atau untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang biasanya dilakukan di tempat terbuka, dengan membawa poster-poster atau lainnya.²⁵
7. Penyertaan atau *Deelneming* merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk unsur turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁶
8. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui

¹⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.134.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 106.

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 167

¹⁸ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses, tanggal, 27 Agustus 2022.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 100.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 83.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm. 198

²³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 90

²⁴ Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm.35

²⁵ Wahyu Utara, *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*, Indonesia Tera, Jakarta, 2014 halaman 404.

²⁶ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 73.

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.²⁸ Ditinjau dari objek kajiannya, maka penelitian normatif ini tergolong kedalam jenis penelitian terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Asas yang peneliti gunakan ialah asas keadilan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, skripsi, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan Peneliti adalah analisis kualitatif. Dengan menghasilkan data deskriptif yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan/*Medeplichtige* Dalam Kasus Kerusuhan Demonstrasi

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela

²⁷ I. Gede Pantja Aswata, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 43

²⁹ *Ibid*, hlm. 52

dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolak ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Penyertaan dan Pembantuan di dalam hukum pidana positif.³⁰

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni pertama, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelneming* atau *accessoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.

Perihal pertanggung jawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat dalam pasal 57 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 57:

“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiganya; Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri; Dalam menentukan pidana bagi si pembantu kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang

sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya-akibatnya.”

Selain itu, dalam pelaksanaannya terkadang Tindak pidana pembantuan ini kerap kali berbentrok dengan Pasal 531 KUHP yakni “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 531 KUHP tersebut bentrok dengan Pasal 56 KUHP dalam kasus putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst, dimana para Terdakwa memberikan pertolongan air untuk pendemo anarkis yang tergeletak dan pingsan akibat terdesak-desak dikeramaian, dengan adanya Pasal 531 tersebut mewajibkan para Terdakwa untuk menolong demonstran tersebut sebab mereka melihat adanya ancaman bahaya maut bagi demonstran yang kelelahan dan hampir pingsan tersebut.

Dengan adanya Pasal 531, hakim sudah seharusnya menimbang pasal tersebut untuk dapat dijadikan dasar pembenar yakni adanya bentuk *overmacht* atau daya paksa.

Daya paksa/ *Overmacht* dalam arti *Noodtoestand* atau keadaan darurat apabila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain.

Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Daya paksa dalam putusan ini dapat dengan jelas tergambar dari tindakan Para Terdakwa yang

³⁰Puput Widya Astuti, “Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan

Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Juristic*, Vol. 02 No. 02, Agustus 2021, Hlm. 219.

menolong para demonstran yang hampir pingsan karena melihat adanya bahaya maut jika tidak menolong para demonstran.

B. Akibat Kesesuaian Dalam Putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst Terkait Dengan Kasus Kerusakan Demonstrasi Dengan Pengaturan Tindak Pidana Pembantuan/*Medeplichtige*

Kesesuaian hakim dalam mempertimbangkan putusan dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 01.30 wib bertempat di kawasan gedung Sarinah yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.11, Jakarta Pusat. Secara singkat kronologinya sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pengumuman Pemilihan Presiden 2019, menyebabkan pendukung calon nomor urut 2 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Uno tidak terima atas kekalahan tersebut. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sejak pukul 09.00 wib, massa yang terdiri dari pendukung pasangan calon nomor urut 2 maupun Front Pembela Islam (FPI) mulai berkumpul di depan Bawaslu RI maupun kawasan sekitarnya untuk melakukan unjuk rasa, tanpa adanya surat pemberitahuan kepada kepolisian, namun pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan melakukan pengamanan di daerah tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, massa pengunjuk rasa yang

memenuhi sekitar kawasan Gedung Sarinah Jakarta Pusat mulai memaksa maju menuju Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat sambil membakar *cone* pembatas jalan, beberapa tong sampah hingga melempari batu, molotov, botol/beling, kelereng, petasan dan anak panah kearah petugas yang berjaga di lokasi hingga terkena Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama Brimob sehingga di lakukan beberapa kali penyemprotan air dari mobil *Water Canon* dan pelemparan gas air mata oleh petugas ke arah massa pengunjuk rasa .

- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib, Saksi Harry Kurniawan, S.IK, M.H. selaku Kapolres Jakarta Pusat, menghimbau kembali kepada massa pengunjuk rasa untuk segera membubarkan diri dan meninggalkan tempat kembali pulang ke rumah masing-masing. Hal tersebut disampaikan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan berulang-ulang, sehingga aparat kepolisian memukul mundur dan pengejaran ke arah pengunjuk rasa yang melarikan diri.
- Kemudian Saksi Jujuk, Saksi Erbinson dll melakukan penyisiran dan mengumpulkan orang-orang yang masih berada dikawasan Bawaslu RI termasuk didalamnya *security* dan *cleaning service* Gedung Sarinah, sebab mereka melihat bahwa sekelompok massa pengunjuk rasa masuk kedalam Gedung dibantu oleh beberapa orang berpakaian preman serta berseragam keamanan/*security* Mall Sarinah Thamrin dengan cara memberikan akses pintu masuk ke dalam area *Loading Dock* Gedung Sarinah.
- Para terdakwa memberikan bantuan berupa ember berisikan

air, galon air dari toilet dekat Pos *ATM Center*, untuk di usapkan ke wajah maupun mata dari massa pengunjuk rasa yang terkena gas air mata dan air mineral untuk di minum oleh massa pengunjuk rasa diantaranya adalah Saksi Ahmad Abdul Syukur sehingga massa pengunjuk rasa tersebut menjadi bugar dan segar kembali untuk melakukan kerusuhan.

- Bahwa akibat dari kerusuhan tersebut menyebabkan anggota Brimob mengalami luka sobek, sesak nafas, kram perut hingga pingsan.

Atas perbuatan tersebut para Terdakwa dijatuhi dakwaan alternatif yakni:

- a. Dakwaan Kesatu: Pasal 212 KUHP jo. Pasal 214 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP
- b. Dakwaan Kedua: Pasal 216 ayat (1) KUHP
- c. Dakwaan Ketiga: Pasal 218 KUHP

Berdasarkan hal diatas maka para Terdakwa dituntut oleh JPU pidana masing-masing terhadap para Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam putusan hakim No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst tersebut dapat diuraikan bahwasanya dalam kasus ini hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa, karena dalam kasus tersebut para Terdakwa dianggap telah melakukan pembantuan terhadap para pendemo, dengan cara memberikan air minum dan air untuk cuci muka yang mana pemberian air tersebut agar para pendemo menjadi bugar dan segar kembali sehingga dapat melanjutkan aksi anarkis serta aksi lempar-lemparan yang diarahkan kepada pihak kepolisian.

Hakim menimbang adanya pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 212 KUHP jo. Pasal 214 jo. Pasal 56 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Sengaja menurut penafsiran hakim dalam putusan ini sebab keberadaan para Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian masih berada di sekitar tempat demonstrasi, walaupun sudah dihibau lebih dari 3 kali untuk bubar oleh anggota kepolisian. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa Para Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan ikut unjuk rasa. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum menyebarkan informasi, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

Menurut pendapat penulis, keberadaan para terdakwa yang masih berada di kawasan tempat kejadian tersebut dapat dijadikan dasar bahwasanya para terdakwa sengaja tidak meninggalkan tempat tersebut karena para terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan unjuk rasa. Namun para Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah jabatan untuk lebur pada hari itu, dan adapun tujuan dari lebur tersebut ialah untuk menambah kekuatan keamanan gedung sarinah dikarenakan adanya aksi demonstrasi.

Lebih dalam terkait dengan pembantuan/ *medeplichtige* syarat adanya bentuk pembantuan itu ada dua

yaitu subjektif dan objektif. Dimana subjektif adalah sengaja atau kesengajaan sedangkan objektif adalah memberi bantuan. Jika dari sudut subjektif perbuatan pembuat pembantu itu dengan sengaja memperlancar dan mempermudah pembuat pelaksana menurut penulis itu sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi, dimana saat terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan para pendemo, karyawan sarinah tersebut membantu atas dasar kemanusiaan bukan untuk memperlancar ataupun mempermudah para pendemo untuk melakukan aksi anarkisnya.

Meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Orang yang hanya secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tidak dapat dihukum.³¹ Sebab perlu melihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Dalam hal ini diperlukan teori kausalitas yang mana didalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Bila dikaitkan dengan teori kausalitas atau sebab akibat, maka penafsiran hakim atas adanya bentuk tindak pidana pembantuan dalam putusan tersebut merupakan hal yang dipaksakan. Sebab tidak ada korelasi langsung antara memberikan bantuan air dengan kembali bugarnya kondisi pendemo anarkis

untuk melanjutkan kerusuhan, dan hal tersebutpun tidak dapat dibuktikan didalam persidangan. Hal itu bertentangan dengan sebuah adagium hukum yakni *Judex debet judicare secundum allegata et probata* atau seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Perkara No. 844/Pid.B/2019/PN.Jak-Pus peneliti anggap keliru sebab hakim mengabaikan fakta bahwa para Terdakwa bersalah atas karena adanya daya paksa/*overmacht* yakni sesuai dengan pasal 531 yang mewajibkan setiap orang untuk memberikan pertolongan bagi orang lain yang sedang berada dalam keadaan bahaya maut. Bagi orang yang dengan sengaja melalaikan kewajiban memberi pertolongan padahal ia sendiri mengetahuinya, dapat dipidana penjara selama tiga bulan. Dengan kata lain, dengan adanya kewajiban itu terdapat dasar pembenar bagi para karyawan Sarinah yang memberikan pertolongan kepada korban represi aparat.

Disamping itu hakim juga dinilai telah melanggar amanat Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembantuan/ *Medeplichtige* diatur dalam Pasal 57 KUHP sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Namun adakalanya pasal ini berbentrok dengan Pasal 531 KUHP terkait dengan kewajiban menolong orang dalam keadaan

³¹Vialdy Widjaya, "Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Disidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP",

Jurnal Lex Crimen, Vol.IX, No. 2. April-Juni 2020. Hlm. 102.

bahaya maut seperti yang diuraikan dalam putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst yang mana merupakan bentuk dari daya paksa/ *overmacht* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Pembantuan.

2. Tidak terdapat kesesuaian antara makna Pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dengan putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst selain itu hakim keliru dalam menjatuhkan putusan sebab hakim mengabaikan fakta bahwa ada alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa. Hakim pun dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

B. Saran

1. Masalah pertanggungjawaban pidana harus sejalan dengan perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup tindak pidana pembantuan. Dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang diperlukan adanya pertimbangan terkait dengan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Hal ini mengingat dalam hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan seseorang sehingga dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana.
2. Bagi majelis hakim agar kedepannya dalam memutus perkara harus menilai lebih dalam terkait dengan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, hakim juga harus menimbang fakta-fakta yang terungkap selama persidangan

sehingga tidak mencederai keadilan bagi masyarakat yang tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana
- Aswata, I. Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farid, Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Prenamedia Group.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung, Laden. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Untara, Wahyu. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Utrecht. 2000. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantar hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjanah Mudahukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Hukum Pidana”. *Lex Crimen*. Vol. II. No. 4 Agustus 2013.
- Setiawan, Hogi Wahyu dkk., “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa”, *Jurnal Harmeneutika*, Vol 5 No. 1 Februari 2021.
- Widjaya, Vialdy. “Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Disidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.IX. No. 2. April-Juni 2020.
- Saputri, Riska. Prinsip Kausalitas Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku *Falsafatuna*”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Andrizal. “Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 16. No. 1 Tahun 2016.
- Astuti, Puput Widya. “Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana”. *Jurnal Juristic*. Vol. 02 No. 02. Agustus 2021.
- Hanafi. “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”. *Jurnal Hukum*. Vol. 6 No 11 Tahun 1999.
- Saputra, Bayu Eka. “Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang
- C. Website**
- <https://bantuanhukum.or.id/memenj-arakan-kemuliaan-menguburkan-kemanusiaan-refleksi-persidangan-kasus-kriminalisasi-terhadap-29-karyawan-sarinah>, diakses Kamis 13 Oktober 2022
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses, tanggal, 27 Agustus 2022.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919210751-12-432137/kasus-22-mei-29-pegawai-sarinah-divonis-4-bulan-penjara>, diakses Kamis 13 Oktober 2022.
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
Undang-Undang No 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3789
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5076